



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang kian harinya mengalami kemajuan yang pesat. Banyak yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan akan sistem untuk pengawasan atau *monitoring* secara elektronik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dimana salah satu fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan PBJP secara elektronik. Penyelenggaraan PBJP secara elektronik terdiri dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Untuk menjamin tujuan dan proses penyelenggaraan PBJP berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, LKPP melalui Direktorat Perencanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan perlu mengembangkan aplikasi *monitoring-evaluasi* terhadap penyelenggaraan PBJP yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Maka, dibuat aplikasi *monitoring-evaluasi* atau *MONEVNG*. *MONEVNG* adalah aplikasi monev terpusat yang menjadi Dashboard Pengadaan Nasional yang ditargetkan mampu memberikan informasi dan analisis yang komprehensif dan mendalam kepada para stakeholder pengadaan, termasuk realisasi pengadaan.

Dalam proses pengadaan kerap terjadi pelanggaran, seperti melakukan kecurangan dalam administrasi, pekerjaan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan kerugian negara. Bagi penyedia yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi daftar hitam. Dalam hal ini *MONEVNG* berperan untuk memberikan informasi dan analisis mengenai daftar penyedia yang masuk daftar hitam. Disajikan tampilan grafik sesuai dengan *filter* seperti *Penyedia Berdasarkan Pelanggaran*, *Penyedia Berdasarkan Domisili*, *Penyedia Berdasarkan Penayangan*, *Daftar Hitam Berdasarkan Jenis Pengadaan*, dan *Berdasarkan Daftar Hitam Aktif Ikut Pengadaan*. Untuk menjalankan fungsi PBJP fitur Daftar Hitam pada aplikasi *MONEVNG* perlu dikembangkan agar kegiatan *monitoring-evaluasi* serta pengadaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan pengembangan fitur Daftar Hitam pada aplikasi *MONEVNG* adalah sebagai berikut:

- a. Membuat fitur daftar hitam pada aplikasi *MONEVNG* di Divisi PMEP;
- b. Fitur daftar hitam dapat diakses untuk melakukan fungsi *monitoring* dan evaluasi pengadaan;



1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan fitur Daftar Hitam pada aplikasi *MONEVNG* sebagai berikut:

- a Meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi *monitoring* dan evaluasi pengadaan khususnya untuk Daftar Hitam;
- b Memberikan analisis mengenai daftar penyedia yang masuk daftar hitam;
- c Memberikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia selama proses pengadaan barang/jasa.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pengembangan fitur Daftar Hitam pada aplikasi *MONEVNG* sebagai berikut:

- a *MONEVNG* merupakan aplikasi berbasis *web*;
- b Mengembangkan tampilan aplikasi, dan visualisasi data.

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.